



eISSN 3032-601X & pISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3, 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3, 2024

Pages: 442-447

Analisis Evaluasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

Rizki Amilia

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister
DOI	: https://doi.org/10.32672/mister.v1i3.1616

How to Cite this Article

APA	: Amilia, R. (2024). Analisis Evaluasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. <i>MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 1(3), 442 - 447. https://doi.org/10.32672/mister.v1i3.1616
Others Visit	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



Analisis Evaluasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

Rizki Amilia

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang,
Indonesia

Email corresponding author: rizki.amilia@binabangsa.ac.id

Diterima: 15-05-2024 | Disetujui: 17-05-2024 | Diterbitkan: 18-05-2024

ABSTRACT

This research was conducted in the Banten region, precisely in Serang City. This research method was conducted through literature studies and journal reviews, especially those that can be accessed online. The researcher's view is that a qualitative approach will help researchers in collecting data. This research method uses a qualitative descriptive method, where analyzing the data is described in descriptive form. According to qualitative descriptive research, which is research that seeks to describe an event in the object of research that is analyzed so as to produce a problem solution. The implementation of waste management carried out by the Serang City Government has not been fully implemented as stated in Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Waste Management. Based on the results of the analysis, it can be said that the policy evaluation in Serang City has not been maximized because waste management is still not maximizing the main problem.

Keywords: Waste Management; Community; Policy; Environment Agency; Serang City

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di wilayah Banten tepatnya di Kota Serang. Metode penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan jurnal review, terutama yang dapat diakses secara online. Pandangan peneliti bahwa pendekatan kualitatif akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Ini metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana menganalisis datanya digambarkan dalam bentuk deskriptif. Menurut kualitatif penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu peristiwa dalam objek penelitian yang dianalisis sehingga menghasilkan solusi masalah. Pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintahan Kota Serang belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dikatakan evaluasi kebijakan di Kota Serang belum maksimal karena pengelolaan sampah yang masih belum maksimal masalah utama.

Katakunci: Pengelolaan Sampah; Masyarakat; Kebijakan; Dinas Lingkungan Hidup; Kota Serang

PENDAHULUAN

Sampah dan limbah merupakan salah satu problematika yang hingga kini masih dihadapi secara global. Problematika ini terhubung dengan pertumbuhan penduduk, ekonomi, serta perilaku konsumtif masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. Karena permasalahan sampah ini masih perlu adanya perhatian dan kesadaran penuh, baik masyarakat maupun pemerintah. Dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang penmgelolaan sampah adalah sisah kegiatan sehari-hari manusia yang dianggap sudah tidak berguna lagi yang bersifat organik atau non organik. Sampah ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius dan Indonesia masuk dalam peringkat teratas sebagai penghasil sampah terbesar didunia, maka pemerintah perlu memikirkan penanganan terhadap sampah tersebut. Karena hal ini, meningkatkan laju produksi sampah sejajar dengan pertumbuhan jumlah penduduk

Kota serang yang merupakan ibukota dari banten yang memiliki wilayah yang luas. Jadi tidak dapat dipungkiri setiap tahunnya, kota serang berpotensi menyumbang peningkatan terhadap sampah, Dalam kemajuan masyarakat yang semakin modern tentunya tidak akan terlepas dari kebutuhan pokok sehari-hari. Dari pemenuhan kebutuhan pokok itu pasti akan berujung pada peningkatan jumlah sampah setiap harinya. Peningkatan jumlah sampah tersebut juga diiringi perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang (DLHK) Kota Serang menghasilkan 800 ton per hari. Tapi, yang dibuang (terangkut) itu hanya 400 ton karena keterbatasan armada truk. Dengan permasalahan sampah yang ada di Kota Serang yang belum terselesaikan dengan baik Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dimana dalam kerja tersebut per harinya pengiriman mencapai 400 ton sampah yang dikirim dari Tangerang Selatan ke Kota Serang. Jika ditambah dengan sampah dari Kota Serang yang mencapai 800 ton per harinya, artinya setiap hari Kota Serang menerima sampah sebanyak 1200 ton per harinya. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong digunakan pertama kali pada 1995-saat ini. TPAS ini merupakan milik Pemerintah Kota Serang (DLH Kota Serang). TPAS ini merupakan pembuangan sampah yang berada di Kota Serang dan menjadi pembuangan sampah juga dari Kota Tangerg Selatan. Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang juga merupakan hak asasi setiap warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Langkah Pemerintah Kota Serang yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang pengeloaan sampah dengan pengirim sampah ke TPAS Cilowong membawa dampak yang merugikan masyarakat. Masyarakat sekitar TPAS Cilowong mencium aroma busuk dari truk yang dikirim dari Tangerang Selatan.

Dalam pelaksanaan pengeloaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang belum sepenuhnya berjalan seperti apa yang diamatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengeloaan Sampah. Dengan masyarakat yang tidak disosialisasikan mengenai kerja sama tersebut dan bau sampah yang menyengat akhirnya sebagai bentuk

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji sistem pengelolaan sampah pada kota serang yang belum cukup baik dalam pengelolan sampah berkelanjutan dalam rangka memahami strategi pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai acuan dalam pengelolaan sampah. Penelitian fokus mengkaji pengelolaan sampah di Kota Serang. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan review jurnal khususnya yang dapat diakses secara

online. Peneliti memandang pendekatan secara kualitatif akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana dalam menganalisis data diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu kejadian pada objek penelitian yang dianalisis sehingga menghasilkan suatu solusi dari suatu masalah (Sulastri, Purnomo, Setiawan, Fa thani, & Oktiawan, 2020). Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal sekitar sepuluh jurnal yang membahas kebijakan pengelolaan sampah dan sikap pemerintah daerah dalam menangani sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekecewaan masyarakat melakukan penyetoran truk dari Tangerang Selatan untuk kembali lagi ke Tangerang Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Serang hanya membawa dampak positif bagi pemerintah kota saja dengan menerima bantuan sebesar 21,7 Miliar selama 3 tahun, Kompensasi yang diberikan tentu tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pencemaran lingkungan yang berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat Cilowong atau jalur truk yang setiap hari dilewati yang mengundang bau busuk. Walaupun Pemerintah Kota Serang telah berdialog dengan masyarakat mengenai solusi yang bakal dihasilkan, kerja sama ini juga mendapat perhatian dari para aktivis. Dengan reaksi yang timbul di masyarakat memberi informasi bahwa Pemerintah Kota Serang belum sepenuhnya menjalankan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang perlu bertanggung jawab pada kebijakan yang dibuat khususnya pada pelaksanaan Pasal 23 dan 45.

Bahwa setiap TPS mendukung satu sama lain, menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efektif. Aturan keputusan yang tertuang dalam Perda dan Peraturan Walikota, terutama dengan fokus pada pemilahan sampah, merupakan langkah positif menuju pengelolaan yang lebih efisien. Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan efektif di seluruh rantai (Saraswati et al., 2023)

Manusia dalam kehidupan ini melakukan berbagai aktivitas. Sisa hasil dari aktivitas yang dilakukan yaitu berupa sampah. Menurut definisi World Health Organization (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. (Permatasari & Meirinawati, 2017)

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dengan diiringi permintaan akan infrastruktur yang tinggi, membuat perubahan drastis pada pola tata guna lahan. Wilayah perkotaan telah menghabiskan 75% sumber daya alam yang mengakibatkan perkotaan menjadi penyumbang terbesar dalam perubahan iklim (Purnama, 2023)

Kajian dan Regulasi Pengelolaan Sampah

Sebenarnya banyak regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dalam mengelola sampah namun regulasi itu banyak yang tidak dijalankan. Menurut peneliti jika UUPS itu dijalankan dengan baik maka persoalan sampah tidak akan begitu sulit. Penting bagi Pemerintah untuk menjadikan UUPS sebagai pijakan dalam pengelolaan sampah. Seperti UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) khususnya pada Pasal 12 bagian 2 yang berbunyi:

1. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Artinya adalah bahwa didalam ayat 1 ada kewajiban bagi setiap orang untuk menangani dan juga mengurangi samapahnya sendiri. Persoalannya adalah apakah regulasi yang telah dibuat dijalankan oleh pemerintah daerah dan disampaikan pada masyarakat. Dipasal 13 juga dijelaskan kembali yang berbunyi: “Pengelola kawasan permukiman kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah”(Hodomuan & Retnowati WD Tuti, 2022)

Dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah pemerintah kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih belum bisa mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di kota Bandung. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi pada kebijakan pengelolaan sampah pemerintah kota Bandung. Pada dasarnya evaluasi pengelolaan sampah memiliki tujuan agar kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola sampah dapat meningkat sehingga permasalahan sampah di kota Bandung dapat terselesaikan. Adanya tuntutan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah serta demi mencapai terciptanya kebersihan lingkungan melalui kebijakan pengelolaan sampah kota Bandung, evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan aspek efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), perataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness). (Janatun et al., 2023)

- 1) Efektifitas Pada siklus kebijakan evaluasi merupakan salah satu proses yang penting setelah kebijakan tersebut berlaku. Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil dari implementasi suatu kebijakan. Tentunya, untuk menilai hasil implementasi perlu dilakukan analisis mengenai tingkat keberhasilan implementasi, kegagalan dalam implementasi, efektivitas, dan efisiensi. Dalam kajian ilmiah efektivitas merupakan bagaimana tujuan pada kebijakan telah tercapai dengan maksimal menggunakan cara, sumber daya, dan alat yang ada.
- 2) Efisiensi. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan melalui cara, besarnya sumber daya, dan alat yang digunakan. Artinya, efisiensi mengukur bagaimana suatu kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tujuan dari adanya suatu kebijakan dengan hasil yang optimal namun dengan tidak baik
- 3) *Adequacy*/kecukupan. Kriteria kecukupan mengkaji seberapa baik kebijakan yang telah ditetapkan dapat mengatasi masalah atau menyelesaikan krisis. Kriteria kecukupan memberikan penekanan khusus pada seberapa kuat alternatif kebijakan berhubungan dengan hasil yang diantisipasi. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada seberapa akurat.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi kebijakan publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengelolaan sampah, ada beberapa poin penting yang perlu dibahas. Kebijakan komprehensif: Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Serang cukup komprehensif, mencakup berbagai aspek seperti pengurangan sampah, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan akhir. Politik komitmen: Pemerintah Kota Serang menunjukkan komitmen politik yang kuat dalam pengelolaan sampah, dibuktikan dengan diterbitkannya berbagai peraturan daerah dan kebijakan terkait. Pendidikan dan sosialisasi. Upaya: Dinas

Lingkungan Hidup Kota Serang aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kelemahan Kebijakan Implementasi yang kurang optimal. Implementasi kebijakan di lapangan masih belum maksimal, terutama dari segi partisipasi dan tempat pembuangan. pengurangan sampah dan keterlibatan masyarakat. Keterbatasan anggaran: Keterbatasan anggaran adalah salah satu hal utama kendala pengelolaan sampah di Kota Serang. adalah Infrastruktur yang belum memadai. seperti tempat pembuangan sampah, dan kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat

Rekomendasi Penguatan implementasi kebijakan: Perlu ada upaya untuk memperkuat implementasi kebijakan di lapangan, antara lain dengan meningkatkan pengawasan dan sanksi. Peningkatan anggaran: Pemerintah Kota Serang perlu menambah anggaran pengelolaan sampah, termasuk pengadaan infrastruktur dan teknologi pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat: Perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat partisipasi dalam pengelolaan sampah, seperti dengan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif, serta memberikan insentif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan di Kota Serang belum maksimal karena pengelolaan sampah masih menjadi isu utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya tempat pembuangan sampah yang belum teratur. Dan partisipasi Masyarakat yang masih rendah Isu ini sampai menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Pada kriteria evaluasi efektivitas, memang adanya peraturan yang ketat dan tegas dari sikap pemerintah melalui berbagai regulasi, namun tidak berhasil dikarenakan penerapan regulasi yang tidak tegas sehingga masih. Kemudian nyambung pada kriteria efisiensi, banyak masyarakat yang tidak taat akan regulasi tersebut dan masih membuang sampah sembarangan sehingga hal tersebut mempengaruhi nilai estetika suatu wilayah karena adanya sampah yang tidak pada tempatnya dan juga bau tidak sedap yang muncul dari sampah-sampah tersebut. Sementara itu, kriteria kecukupan juga belum dapat menyelesaikan masalah karena masih ada TPS yang melebihi kapasitas sehingga mengganggu ketenangan masyarakat di sekitar TPS. Walau pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, agar evaluasi pengelolaan sampah yang memiliki tujuan agar kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola sampah dapat meningkat sehingga permasalahan sampah di kota Serang dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadomuan, M. T., & Retnowati WD Tuti. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13(1), 7–14.
- Janatun, M., Rosiana, I., Reza, R. K., & ... (2023). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung. Nanggroe: Jurnal 2(3), 159–166.
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/NJPC/article/view/265%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/NJPC/article/download/265/298>

- Nurikah, Jajuli, H. . R., & Furqon, E. (2022). Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 434–442.
- Permatasari, B. I., & Meirinawati. (2017). Manajemen Strategi Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 5(6), 1–8.
- Purnama, I. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Serang. *JIMBA Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 1–11.
- Saraswati, P. P., Suyeno, S., & Putra, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). *Respon Publik*, 17(12), 55–65.